

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar Hukum
Entitas dan Rencana
Strategis*

Pelabuhan Perikanan Pekalongan pada awalnya merupakan Pelabuhan Umum yang telah dikelola oleh Departemen Perhubungan, karena pemanfaatannya telah banyak digunakan oleh kapal-kapal perikanan, sejak Desember 1974 pengelolaan dan assetnya diserahkan kepada Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perikanan dengan diubah statusnya menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Setelah itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan melakukan pembangunan sarana dan prasarana operasional Pelabuhan Perikanan dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 310/Kpts/Org/5/1978 tanggal 28 Mei 1978 resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26.I/MEN/2001 (UPT) di bidang perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan tanggal 1 Juni 2001, PPN Pekalongan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan, dibidang Prasarana Perikanan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan operasional perikanan tangkap di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan umum bagi kepentingan nelayan serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,

pendayagunaan, dan pengawasan, pengendalian sarana dan prasarana;

- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Pelabuhan Perikanan
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pelabuhan perikanan sebagai entitas publik yang memiliki tugas operasional dan tanggung jawab pengelolaan anggaran, harus melaporkan seluruh aktivitas keuangannya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan aturan pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan terkait erat dengan kewajiban laporan keuangan karena setiap aktivitas membutuhkan sumber daya dan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini penting untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta mendukung keberlanjutan operasional pelabuhan perikanan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca
- dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	100%

	tidak dilakukan pelunasan	
--	---------------------------	--

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan memperoleh alokasi anggaran pada awal Tahun Anggaran 2025 dan setelah beberapa kali kebijakan blokir dan efisiensi anggaran pada akhirnya Pagu sebesar Rp15,842,399,000 pada akhir Semester II 2025. Selama Semester II tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal sebanyak 14 kali disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah, kebijakan efisiensi pemerintah dan revisi administrasi (halaman III DIPA dan pencatatan POK) serta realokasi anggaran (belanja pegawai) sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Berdasarkan kebijakan *automatic adjustment* atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L, maka jumlah anggaran PPN Pekalongan Semester II Tahun Anggaran 2025 yang diblokir adalah sebesar Rp0.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. RINCIAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
		Blokir	Pagu Yang Dapat Dipakai
Pendapatan			
Pendapatan PNPB	535,046,000	0	535,046,000
Jumlah Pendapatan	535,046,000	0	535,046,000
Belanja			
Belanja Pegawai	9,346,615,000	0	9,346,615,000
Belanja Barang	6,299,894,000	0	6,299,894,000
Belanja Modal	195,890,000	0	195,890,000
Jumlah Belanja	15,842,399,000	0	15,842,399,000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp1.249.092.083

Realisasi Pendapatan tersebut berasal dari Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.249.092.083 atau mencapai 233,46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp535.046.000.

Secara umum jika dibandingkan dengan Semester II 2024 terdapat penurunan pendapatan sejumlah Rp.104,772,475 atau sebesar -7,74% . Prosentase kenaikan ada pada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang berasal dari penjualan melalui lelang 1 unit Suction Dredger sesuai Risalah Salinan Risalah Lelang No 15/09.03/2025-1 tanggal 4 Februari 2025 senilai Rp. 180,329,000 dan 4 unit Alat berat berupa (Crewer Escavator+Forklift), (Sweeper Rotary dan Tongkang bermotor) senilai Rp. 205,199,914 dengan Salinan Risalah Lelang No. 156/09.03/2025-01 tanggal 08 Oktober 2025. ada juga pendapatan yang terbesar dari Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan yang diantaranya berasal dari jasa tambat labuh, pas masuk orang wisata bahari dan kebersihan kolam pelabuhan perikanan dll. Selanjutnya berasal dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi diantaranya penyewaan alat berat, dan sewa rumah dinas. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 660,605 berasal dari pengembalian Tukin dan Uang makan PNS dan PPK bulan Desember 2024, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun anggaran yang lalu berasal dari pengembalian dobel pembayaran telepon dari telkom sebesar Rp. 81.141. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. RINCIAN ESTIMASI DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2025

(dalam Rupiah)

Uraian		Tahun Anggaran 2025		
		Estimasi Penerimaan	Realisasi	%
	Pendapatan dan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan (425121)	0	0	0
	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	0	385.528.914	0
	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151)	10.000.000	29.423.968	294
	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (425621)	534.046.000	833.397.455	156
	Pendapatan Lain-lain (4259)	0	660.605	0
	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	660.605	660.605	100
	Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	81.141	81.141	100
	Jumlah	535.046.000	1.249.092.083	233.46

Sampai dengan 31 Desember 2025 penyumbang penerimaan negara bukan pajak terbesar ada pada akun 4256 Pendapatan Pendapatan Jasa Lainnya yakni sebesar Rp1.248.350.337 yang keseluruhan berasal Jasa Pelabuhan Perikanan. Ada 3 jenis PNPB terbesar dari Jasa Pelabuhan Perikanan yaitu yang berasal dari Tambat Labuh, Pas Masuk Orang Wisata Bahari dan Kebersihan Kolam Kapal Perikanan.

Ditempat kedua berasal dari akun 4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp725.971.544, dengan rincian sebagai berikut :

1. Akun 425122 Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan hasil penjualan melalui lelang atas 1 Unit Suction Dredger dengan Risalah Lelang Nomor : 15/09.03/2025-1 tanggal 4 Februari 2025 senilai Rp 180.329.000. dan 4 unit alat berat berupa Crewer Escavator, Forklift, Sweeper Rotary dan Tongkang bermotor senilai Rp. 205,199,914 dengan Salinan Risalah Lelang No. 156/09,03/2025-01 tanggal 08 Oktober 2025.
2. Akun 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp29.423.968 berasal dari sewa rumah dinas, penyewaan alat berat berupa forklift.
3. Akun 425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan sesuai dengan TUSI senilai Rp833.397.455 berasal dari jasa tambat labuh, pas masuk orang wisata bahari dan kebersihan kolam pelabuhan

perikanan.

4. Akun 425911 Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 660,605 berasal dari pengembalian Tukin dan Uang makan PNS dan PPPK bulan Desember 2024 yang dibayarkan Januari 2025.
5. Akun 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun anggaran yang lalu berasal dari pengembalian dobel pembayaran telepon dari telkom sebesar Rp. 81.141

Sedangkan jika dibandingkan antara estimasi belanja dengan realisasi pendapatan tahun berjalan, terdapat realisasi yang melebihi estimasi sebesar 233,46%. Penyebab tercapainya kelebihan realisasi PNBFP tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan dengan 3 jenis pendapatan terbesar berupa Pendapatan dari Kebersihan Kolam Kapal Perikanan, Pas Masuk Wahana Edukasi Air dan Pas Masuk Roda 4 Wisata Bahari serta adanya pendapatan dari sewa forklift dan aula (Balai Pertemuan);
2. Adanya kenaikan nilai sewa rumah negara per bulan sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 yang dituangkan dalam Surat Izin Penggunaan Rumah Dinas Nomor B.1032/PPN.PKL/KP.630/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 an. Kartono dan Nomor B.1033/PPN.PKL/KP.630/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 an. Jajang H.;
3. Adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari pengembalian uang makan dan tunjangan kinerja Bulan Desember 2024 yang disetorkan ke kas negara pada Bulan Januari 2025.
4. Adanya kegiatan penghapusan melalui lelang atas Suction Dredger pada semester I 2025 dan 4 alat berat yang dilakukan pada semester II Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni senilai Rp104.772.475 atau sebesar -7,74%. Terdapat penurunan penerimaan sebesar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Rincian sebagai berikut:

Tabel 3. PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ Turun	%
Pendapatan Umum				
Pendapatan dan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	0	16.719.000	(16.719.000)	(100)
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	385.528.914	343.306.990	42.221.924	12,30
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	5.894.098	(5.894.098)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	660.605	376.691	283.914	75,37
Penerimaan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	81.141	1.978.020	(1.896.879)	(95,90)
Pendapatan Fungsional				
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	29.423.968	4.875.000	24.548.968	503,57
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	833.397.455	980.714.759	(147.317.304)	(15,02)
Jumlah	1.249.092.083	1.353.864.558	(104.772.475)	(7,74)

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp13,784,309,334

Realisasi Belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp13,784,309,334 atau 87,01 % dari anggaran belanja sebesar Rp15,842,399,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025				
	Anggaran	Belanja	Pengembalian Belanja	Belanja Netto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	9.346.615.000	9,292,292,690	278	9,292,292,412	99,42
Belanja Gaji dan Tunjangan (511)	4.941.562.000	3,699,273,160	278	3,699,272,882	99,89
Belanja Honorarium/ Lembur/ Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (512)	4.405.053.000	4.405.053.000	0	4.405.053.000	100
Belanja Barang	6.299.894.000	4.296.564.421	0	4.296.564.421	68,02
Belanja Barang (521)	1.027.796.000	850.392.205	0	850.392.205	81,64
Belanja Jasa (522)	1.730.603.000	1.693.820.435	0	1.693.820.435	97,87
Belanja Pemeliharaan (523)	3.409.538.000	1.658.075.771	0	1.658.075.771	48,63
Belanja Perjalanan Dinas (524)	131.957.000	94.276.010	0	94.276.010	71,44
Belanja Modal	195,890,000	195,452,501	0	195,452,501	100
Belanja Modal Tanah (531)	0	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532)	195,890,000	195,452,501	0	195,452,501	99,78
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534)	0	0	0	0	0
Jumlah	15,842,399,000	13,784,309,612	278	13,784,309,334	87,01

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 7,33% Terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp1.090.940.522 atau sebesar 7,33%. Jika dibandingkan dengan Semester II 2024. Penurunan berasal dari Belanja Barang sejumlah Rp. 1.591.401.560 atau 27,03% dikarenakan adanya blokir sebagian anggaran pemeliharaan. Sedangkan untuk Belanja Modal Juga mengalami penurunan dikarenakan anggaran diblokir, dan Belanja Pegawai justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama, masing-masing sebesar Rp. 1.268.472.044 Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Realisasi Belanja Pegawai berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan (511) dan Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (512).

Realisasi Belanja Barang berasal dari Belanja Barang (521), Belanja Jasa (522), Belanja Pemeliharaan (523), dan Belanja Perjalanan Dinas (524).

Sedangkan realisasi Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Tanah (531), Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532) dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534).

Berikut perbandingan rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024:

Tabel 5. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Semester II 2025	Realisasi 2024	Naik/ Turun	%
Belanja Pegawai	9.292.292.412	8.023.820.368	1.268.472.044	15,81
Belanja Barang	4.296.564.421	5.887.965.981	(1.591.401.560)	(27,03)
Belanja Modal	195.452.501	963.463.507	(768.011.006)	(79,71)
Jumlah	13.784.309.334	14.875.249.856	1.090.940.522	(7,33)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Rp9,292,292,412

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,292,292,412 dan Rp8,023,820,368. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal :

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,81 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya kenaikan signifikan pada belanja pegawai PPPK. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan 7 orang CPNS dalam kurun waktu 1 Juni 2025 Selain itu kenaikan belanja pegawai gaji. Demikian pula adanya kebijakan pembayaran Tunjangan Kinerja 13 dan 14 yang pada tahun 2025 dibayarkan 100%. Sedangkan adanya kenaikan uang makan PNS disebabkan adanya sejumlah PNS yang detasering di pelabuhan binaan dalam rangka penangkapan ikan terukur.

Tabel 6. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Naik/ Turun	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.992.403.000	5.857.411.495	1.134.991.505	19,38
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.354.212.000	2.167.530.158	186.681.842	8,61
Jumlah Belanja Kotor	9.292.292.690	8.024.941.653	1.268.472.044	15,79
Pengembalian Belanja Pegawai	278	1.121.285	1.121.007	-99,98
Jumlah Belanja	9.292.292.412	8.023.820.368	1.268.472.044	15,81

Komposisi pegawai per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. KOMPOSISI PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2025

		Pegawai PPN Pekalongan 31 Desember 2025																
No	Jabatan	Golongan (PNS)				Golongan (PPPK)				Total	Pendidikan							
		I	II	III	IV	I	V	VII	IX		SD	SMP	SMA	D-3	D4	S1	S2	Total
1	Kepala Pelabuhan				1					1							1	1
2	Kepala Subbagian Umum			1						1						1		1
3	Syahbandar Pelabuhan Perikanan			2						2					2			2
4	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana									0								0
5	Operator Layanan Operasional						2			2			2					2
6	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan			7						7					7			7
7	Pengadministrasi Perkantoran						1			1			1					1
8	Pengelola Barang Milik Negara			2						2						2		2
9	Pengelola Data			1						1						1		1
10	Pengelola Kesyahbandaran			3						3			1		1	1		3
11	Pengelola Keuangan			2						2			1	1				2
12	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan			1						1						1		1
13	Pengelola Layanan Operasional							1		1				1				1
14	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana		1	4						5		1	3			1		5
15	Pengelola Umum Operasional					1				1	1							1
16	Pengolah Informasi Media			1						1						1		1
17	Sekretaris			1						1					1			1
Sub Total		0	1	25	1	1	3	1	0	32	1	1	8	2	11	8	1	32
18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda			2						2						2		2
19	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama			1						1						1		1
20	Arsiparis Ahli Pertama								1	1						1		1
21	Arsiparis Pelaksana		1							1				1				1
22	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir			4						4			3	1				4
23	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula		1				6			7			7					7
24	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil		3					2		5			2	3				5
25	Penata Perizinan Ahli Muda			1						1						1		1
26	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda			4						4						1	3	4
27	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama			5					6	11					6	5		11
28	Pranata Humas Ahli Pertama								1	1						1		1
29	Pranata Humas Pelaksana		1							1				1				1
30	Pranata Keuangan APBN Penyelia			1						1						1		1
31	Pranata Keuangan APBN Mahir			1						1				1				1
32	Pranata Komputer Ahli Pertama								1	1						1		1
33	Pranata Komputer Terampil							1		1				1				1
34	Pranata SDM Aparatur Terampil		2							2				2				2
Sub Total		0	8	19	0	0	6	3	9	45	0	0	12	7	6	14	3	45
JUMLAH		0	9	44	1	1	9	4	9	77	1	1	20	9	17	22	4	77
35	Tenaga Kebersihan										1							1
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		0	9	44	1	1	9	4	9	78	2	1	20	9	17	22	4	78
36	Tenaga Keamanan																	12
37	Tenaga Kebersihan																	14
38	Tenaga Pengemudi																	2
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
JUMLAH		0	9	44	1		9	4	9		2	1	20	9	17	22	4	106

B.4 Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang
Rp4.296.564.421*

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.296.564.421 dan Rp5.887.965.981. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 27,03% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya semua penurunan pada belanja barang. Jenis belanja barang yang mengalami penurunan diantaranya : Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Besaran penurunan jenis belanja terbesar terletak pada penurunan realisasi belanja jasa sebesar Rp. 1.591.401.560,- (27,03%), belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp.714.367.360,- (88,34%), Belanja Pemeliharaan sejumlah Rp. 267.841.413,- (13,91%), belanja barang operasional senilai Rp. 99.376.285,- (13,88%) dan Belanja Non Operasional sebesar Rp. 396.949.651,- (77,97%). Penyebab adanya kenaikan pada belanja persediaan dan penurunan pada belanja jasa diantaranya adanya perubahan kebijakan pembayaran honor kontrak perorangan petugas pendataan sebanyak 48 orang yang tadinya dikelola oleh satker, mulai tahun 2024 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap namun operasional pegawai dan kantornya dibebankan pada PPN Pekalongan, serta adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja tersebut:

Tabel 8. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA BARANG PER 31 DESEMBER TA 2025 DAN TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 2024	Naik/ Turun	%
Belanja Barang Operasional	616.565.468	715.941.753	(99.376.285)	(13,88)
Belanja Barang Non Operasional	112.175.137	509.124.788	(396.949.651)	(77,97)
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	121.651.600	135.383.000	(13.731.400)	(10,14)
Belanja Jasa	1.693.820.435	1.794.413.886	(100.593.451)	(5,61)
Belanja Pemeliharaan	1.658.075.771	1.925.917.184	(267.841.413)	(13,91)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	94.276.010	808.643.370	(714.367.360)	(88,34)
Jumlah Belanja Kotor	4.296.564.421	5.889.423.981	(1.592.859.560)	(27,04)
Pengembalian Belanja Barang	0	1.458.000	(1.458.000)	(100,00)
Jumlah Belanja	4.296.564.421	5.887.965.981	(1.591.401.560)	(27,03)

Penyebab kenaikan/penurunan pada masing-masing belanja adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Belanja Barang Non Operasional diantaranya akibat belum terealisasinya beberapa kegiatan yang sumber dananya berasal dari PNPB.
2. Penurunan Belanja Persediaan Barang Konsumsi diantaranya akibat adanya penambahan persediaan untuk operasional petugas pendataan yang ditempatkan Pekalongan, Tegalsari, Bajomulyo, Klidang Lor dan Tasik Agung. Berikut rincian barang persediaan per 31 Desember 2025:

Tabel 9. RINCIAN BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran Berita Acara Hasil Inventarisasi Persediaan

NOMOR : B.0214 /37.0/PL-940/I/2026

**Rincian Barang Persediaan Hasil Inventarisasi Persediaan
Per 31 Desember 2025**

No.	Kode Barang	Urian Kode Barang	Satuan	Saldo Sistem	Hasil Opsik	Nilai	KONDISI Baik/ Usang/ Rusak
1	1010301001000065	Stapler kenko HD 10	PCS	3	3	31.500	Baik
2	1010301001000073	lakban bening	roll	3	3	19.500	Baik
3	1010301001000077	Lakban bening 2	Roll	3	3	31.500	Baik
4	1010301001000100	lakban hitam 2	rol	2	2	44.000	Baik
5	1010301001000111	Klip kenko no.3	Dus	1	1	2.250	Baik
6	1010301001000112	Pen standard AE7	Pcs	6	6	13.500	Baik
7	1010301001000121	papan ujian akrilik	buah	18	18	477.000	Baik
8	1010301001000122	Dobel tape 1/2	roll	3	3	12.000	Baik
9	1010301001000124	calculator casio 120D	biji	2	2	420.000	Baik
10	1010301001000126	bolpen spiral jayko	biji	8	8	80.000	Baik
11	1010301002000001	tinta stempel stamp pad	botol	7	7	31.500	Baik
12	1010301004000003	Penghapus WB	Biji	1	1	7.500	Baik
13	1010301006000011	Stop Map Tebal	buah	230	230	1.495.000	Baik
14	1010301006000016	map kancing	pak	2	2	77.000	Baik
15	1010301006000019	Ordner bantex F4	biji	3	3	75.000	Baik
16	1010301008000001	cutter besar	buah	5	5	102.500	Baik
17	1010301014000002	Blangko SPB	buku	10	10	1.850.000	Baik
18	1010301014000009	blangko pernyataan nakhoda	buku	9	9	643.500	Baik
19	1010301014000012	blangko STBLK	buku	10	10	1.700.000	Baik
20	1010301014000013	blangko pemeriksaan administratif	buku	2	2	143.000	Baik
21	1010301014000014	blangko pemeriksaan nautis	buku	12	12	1.584.000	Baik
22	1010301014000025	Pas Masuk Aquarium	buku	10	10	100.000	Baik
23	1010301014000027	blangko pemberbasan SPB	buku	8	8	572.000	Baik
24	1010301014000042	PM Parkir Roda 6 WB	buku	40	40	220.000	Baik
25	1010301014000043	PM Parkir roda 10 WB	buku	40	40	220.000	Baik
26	1010301014000044	PM parkir roda 10lebih WB	buku	40	40	220.000	Baik
27	1010301014000047	Logbook Kesyahbandaran	buku	2	2	143.000	Baik
28	1010301014000048	Pernyataan Nakhoda	buku	1	1	71.500	Baik
29	1010301014000049	Persetujuan berlayar	buku	7	7	1.295.000	Baik
30	1010301014000051	Master Siling	buku	8	8	1.056.000	Baik
31	1010301014000052	Pemeriksaan Administrati	buku	7	7	924.000	Baik
32	1010301014000053	orm Datar Nakhoda dan ABK	buku	8	8	572.000	Baik
33	1010301014000054	Blangko SPPD	rim	3	3	750.000	Baik
34	1010301014000060	blangko dok. crewlist	buku	15	15	2.550.000	Baik
35	1010301014000064	Dok. Persetujuan Olah Gerak Kapal	buku	3	3	214.500	Baik
36	1010301014000065	Penerbitan Olah Gerak Kapal	buku	7	7	924.000	Baik
37	1010301014000066	STBLK Kedatangan Kapal	buku	4	4	528.000	Baik
38	1010301014000068	Map Kop Tebal	buah	70	70	770.000	Baik
39	1010301014000071	LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN	BUKU	2	2	332.000	Baik

3. Penurunan belanja jasa diantaranya akibat perubahan kebijakan pembayaran honor kontrak perorangan petugas pendataan sebanyak 48 orang yang tadinya dikelola oleh satker, mulai tahun 2024 dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.
4. Penurunan Belanja Pemeliharaan diantaranya akibat adanya kebijakan penghentian penggunaan barang-barang yang rusak sehingga tidak dilakukan pemeliharaan lagi atas barang-barang tersebut, serta adanya kebijakan blokir anggaran dari pemerintah dan efisiensi.
5. Penurunan Belanja Perjalanan Dinas diantaranya akibat adanya beberapa kegiatan yang dilakukan secara online (*zoom*) maupun hibrid sehingga peserta kegiatan tidak harus menghadiri secara langsung (*offline*). Serta kebijakan pembatasan perjalanan dinas efisiensi anggaran.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Rp195.452.501

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp195.452.501 dan Rp963.463.507. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk Belanja modal secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 768,011,006 atau (79,71%) dari tahun anggaran sebelumnya, untuk tahun 2025 hanya ada belanja Modal Peralatan dan Mesin yang ada pagu dan realisasinya, jika dibandingkan dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 maka adanya penurunan Belanja sejumlah Rp.233.931.299,- (54,48%)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 berupa Sarana Perkantoran Rp. 118.199.999 terdiri dari 1 Unit Televisi Panasonic, 1 Unit PC My PC One Axio, 3 Unit Laptop Axio, 3 Unit Laptop Accer dan 2 Unit Printer Epson, Alat Pengolah Data dan Informasi sebesar Rp. 60.000.002 terdiri dari 4 Unit laptop Asus + Office Home 2024, 1 Unit Tablet Advance Rp. 1.880.000, 1 Unit Proyektor LCD Epson sebesar Rp. 7.215.000 dan 1 Unit Speaker Aktif/ Loudspeaker sebesar Rp. 3.607.500.

Tabel 10. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi sd 30 Juni 2025	Realisasi 2024	Naik/ Turun	%
Belanja Modal Tanah	0	49.867.279	49.867.279	-100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.452.501	429.383.800	233.931.299	-54,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	484.212.428	484.212.428	-100
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	195.452.501	963.463.507	768.011.006	-79,71
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	195.452.501	963.463.507	768.011.006	-79,71

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp49.867.279. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel 11. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TANAH SEMESTER I TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi per 30 Juni 2025	Realisasi 2024	Naik/ Turun	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	49.867.279	49.867.279	-100
Jumlah Belanja Kotor	0	49.867.279	49.867.279	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	49.867.279	49.867.279	-100

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp429.383.800, mengalami penurunan sebesar 54,48 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Belanja modal tidak ada realisasi sampai denan semester II 2025 dikarenakan semua belanja modal diblokir anggarannya dalam rangka efisiensi sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Tabel 12. PERBANDINGAN REALIASI BELANJA PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 2023	Naik/ Turun	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.452.501	429.383.800	233.931.299	-54,48
Jumlah Belanja Kotor	195.452.501	429.383.800	233.931.299	-54,48
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.452.501	429.383.800	233.931.299	-54,48

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari tidak adanya

transaksi penambahan maupun pengurangan pada belanja modal ini.

Tabel 13. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi per 30 Juni 2025	Realisasi 2024	Naik/ Turun	%
Renovasi Gedung Kantor	~	~	~	~
Jumlah Belanja Kotor	~	~	~	~
Pengembalian Belanja Modal	~	~	~	~
Jumlah Belanja Modal	~	~	~	~

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp484.212.428, sebesar 100,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya transaksi penambahan maupun pengurangan pada belanja modal ini.. Hal ini disebabkan tidak adanya transaksi penambahan maupun pengurangan pada belanja modal ini..

Tabel 14. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi per 30 Juni 2025	Realisasi 2024	Naik/Turun	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	484.212.428	484.212.428	-100
Jumlah Belanja Kotor	0	484.212.428	484.212.428	-100
Pengembalian Belanja Modal				
Jumlah Belanja Modal	0	484.212.428	484.212.428	-100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp511,652,203*

Jumlah Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp511,652,203 dan Rp299,342,460.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: :

Tabel 15. JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uang Persediaan	Tahun per 31 Desember 2025	Tahun 2024
Sumber Dana Rupiah Murni (RM)	0	0
Sumber Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 16. RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun per 31 Desember 2025	Tahun 2024
Uang Tunai di brankas	0	0
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. Rekening 653312391711000	0	0
Jumlah	0	0

a
a saldo yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 karena Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 17. RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun per 31 Desember 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	~	~
Rekening Bank	~	~
Jumlah	~	~

Tidak ada saldo yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025, hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak adanya rekening penampungan
2. Semua PNBPN yang diterima oleh Bendahara Penerimaan disetor langsung kas negara.

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp825,018

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp825,018 dan Rp660.605. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 18. PERBANDINGAN PIUTANG BUKAN PAJAK 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun per 31 Desember 2025	Tahun 2024
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	825.018	660.605
Jumlah	825.018	660.605

Rincian Piutang lainnya senilai Rp825.018 berasal dari Pengembalian Tunjangan Kinerja dan Uang makan ASN bulan Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut (daftar nama detail terlampir):

Tabel 19. TABEL RINCIAN PIUTANG LAINNYA PER 31 DESEMBER TA.2025

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1	Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS	175.387
2	Pengembalian Tunjangan Kinerja PPPK	131.631
3	Pengembalian Uang Makan PNS	518.000
	Jumlah	825.018

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp4.125

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.125 dan Rp3.303. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	825.018	0.5%	4.125
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	825.018	%	4.125

C.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

Beban Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp473.860.560

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp473.860.560. dan Rp273.136.408. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan rincian Penerimaan yang Masih Harus Diterima per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. PERBANDINGAN RINCIAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	473.860.560	273.136.408
Jumlah	473.860.560	273.136.408

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2024 terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp473.860.560. Angka tersebut merupakan perhitungan yang berasal dari jasa tambat labuh dan kebersihan kolam atas 29 kapal yang masih berada dalam kolam pelabuhan sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Internal Jasa Tambat Labuh tanggal 31 Desember 2025. (rincian terlampir).

PYMHD pada periode 13 atau Audited ini berbeda dengan periode 12 dikarenakan ada koreksi nilai PYMHD yang semula Rp475.204.160 menjadi Rp473.860.560 sesuai dengan nota dinas dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Nomor 196/PPN.PKL/KU.520/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang Instruksi Pencatatan Pembelian Kursi sebagai BMN Ekstrakomptabel dan Koreksi Nilai PYMHD.

C.1.10 Persediaan

*Persediaan
Rp36,970,750*

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp36.970.750 dan Rp25.548.750. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut::

Tabel 21. PERBANDINGAN PERSEDIAAN 30 JUNI TA 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	36.970.750	25.548.750
Barang untuk Pemeliharaan	~	~
Jumlah	36.970.750	25.548.750

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan senilai Rp.36.970.750,- dalam kondisi baik (rincian terlampir) :

Tabel 22. RINCIAN PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

NO.	KODE BARANG	URIAN	SATUAN	SALDO	NILAI	KONDISI
1.	101030100 1000065	Stapler kenko HD 10	PCS	3	31.500	Baik
2.	101030100 1000073	lakban bening	roll	3	19.500	Baik
3.	101030100 1000077	Lakban bening 2	Roll	3	31.500	Baik
4.	101030100 1000100	lakban hitam 2	rol	2	44.000	Baik
5.	101030100 1000111	Klip kenko no.3	Dus	1	2.250	Baik
6.	101030100 1000112	Pen standard AE7	Pcs	6	13.500	Baik
7.	101030100 1000121	papan ujian akrilik	buah	18	477.000	Baik
8.	101030100 1000122	Dobel tape 1/2	roll	3	12.000	Baik
9.	101030100 1000124	calculator casio 120D	biji	2	420.000	Baik
10.	101030100 1000126	bolpen spiral jayko	biji	8	80.000	Baik
11.	101030100 2000001	finta stempel stamp pad	botal	7	31.500	Baik
12.	101030100 4000003	Penghapus WB	Biji	1	7.500	Baik
13.	101030100 6000011	Stop Map Tebal	buah	230	1.495.000	Baik
14.	101030100 6000016	map kancing	pak	2	77.000	Baik
15.	101030100 6000019	Ordner bantex F4	biji	3	75.000	Baik
16.	101030100 8000001	cutter besar	buah	5	102.500	Baik
17.	101030101 4000002	Blangko SPB	buku	10	1.850.000	Baik

18.	101030101 4000009	blangko pernyataan nakhoda	buku	9	643.500	Baik
19.	101030101 4000012	blangko STBLK	buku	10	1.700.000	Baik
20.	101030101 4000013	blangko pemeriksaan administratif	buku	2	143.000	Baik
21.	101030101 4000014	blangko pemeriksaan nautis	buku	12	1.584.000	Baik
22.	101030101 4000025	Pas Masuk Aquarium	buku	10	100.000	Baik
23.	101030101 4000027	blangko pemberbasan SPB	buku	8	572.000	Baik
24.	101030101 4000042	PM Parkir Roda 6 WB	buku	40	220.000	Baik
25.	101030101 4000043	PM Parkir roda 10 WB	buku	40	220.000	Baik
26.	101030101 4000044	PM parkir roda 10 lebih WB	buku	40	220.000	Baik
27.	101030101 4000047	Logbook Kesyahbandaran	buku	2	143.000	Baik
28.	101030101 4000048	Pernyataan Nakhoda	buku	1	71.500	Baik
29.	101030101 4000049	Persetujuan berlayar	buku	7	1.295.000	Baik
30.	101030101 4000051	Master Siling	buku	8	1.056.000	Baik
31.	101030101 4000052	Pemeriksaan Administratif	buku	7	924.000	Baik
32.	101030101 4000053	orm Datar Nakhoda dan ABK	buku	8	572.000	Baik
33.	101030101 4000054	Blangko SPPD	rim	3	750.000	Baik
34.	101030101 4000060	blangko dok. crewlist	buku	15	2.550.000	Baik
35.	101030101 4000064	Dok. Persetujuan Olah Gerak Kapal	buku	3	214.500	Baik
36.	101030101 4000065	Penerbitan Olah Gerak Kapal	buku	7	924.000	Baik
37.	101030101 4000066	STBLK Kedatangan Kapal	buku	4	528.000	Baik
38.	101030101 4000068	Map Kop Tebal	buah	70	770.000	Baik
39.	101030101 4000071	LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN	BUKU	2	332.000	Baik

40.	101030101 4000073	Tally Sheet Bongkar Kapal Landscape	Rim	8	1.800.000	Baik
41.	101030101 4000074	Tally Sheet Bongkar Kapal Potrait	Rim	8	1.800.000	Baik
42.	101030101 4000080	PM Parkir roda 10 TPI	buku	40	220.000	Baik
43.	101030101 4000081	PM Parkir roda 6 TPI	buku	27	148.500	Baik
44.	101030101 4000082	PM Parkir Bus TPI	buku	40	220.000	Baik
45.	101030101 4000088	Blangko perbekalan kapal	buku	5	850.000	Baik
46.	101030101 4000089	Blangko Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar	buku	5	357.500	Baik
47.	101030101 4000091	Laporan Hasil Produksi	Rim	8	1.056.000	Baik
48.	101030101 4000092	Karcis Masuk TPI Roda 4	buku	20	200.000	Baik
49.	101030101 4000093	Form Sensus Cumi	Pack	10	750.000	Baik
50.	101030101 4000094	Form Sensus Ikan	Pack	5	374.000	Baik
51.	101030101 4000095	Blangko kop Tegalsari	buah	15	2.550.000	Baik
52.	101030101 4000096	Karcis Masuk roda 2/3	buku	70	546.000	Baik
53.	101030199 9000031	lakban ht 2	roll	2	44.000	Baik
54.	101030199 9000033	Doubel foam	roll	2	24.000	Baik
55.	101030199 9000034	isi cutter besar	pcs	7	56.000	Baik
56.	101030200 1000001	kertas hvs 70 gram (folio)	rim	15	862.500	Baik
57.	101030200 1000002	kertas hvs 70 gram (kwarto)	rim	23	1.207.500	Baik
58.	101030400 4000028	Tinta epson 003 BK	botal	7	735.000	Baik
59.	101030400 4000029	Refill Epson	Botal	8	240.000	Baik
60.	101030400 4000034	finta toner compatable	buah	2	260.000	Baik

61.	101030400 4000037	Tinta Epson Ori	botol	5	525.000	Baik
62.	101030400 4000042	Toner Hp ori	Buah	2	1.300.000	Baik
63.	101030400 6000008	flash disk 16 giga	buah	3	225.000	Baik
64.	101030400 6000012	Flash Disk 32 gb	buah	1	83.500	Baik
65.	101030499 9000014	Termal 80x80 printek	Roll	10	167.500	Baik
66.	101030601 0000001	batu battery abc AA	buah	5	20.000	Baik
67.	101030601 0000004	batu alkalin AAA	buah	3	46.500	Baik
TOTAL				971	36,970,750	

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp71,813,864,204

Saldo Aset per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 71,813,864,204 dan Rp71.150.128.183.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Akuntansi Bogor berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1 Tanah

Tanah
Rp35.882.691.279

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp35.882.691.279 dan Rp35.882.691.279. Tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan nilai aset, adanya koreksi perubahan kuantitas pada Tanah no. 5 yaitu Tanah Hasil Reklamasi yang semula berukuran 8.284 m2 menjadi 3.772 m2 sesuai dengan Peta Bidang Tanah No 276/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (terlampir surat keterangan) serta telah tercantum dalam berita acara inventaris barang Nomor : B. 1521/PPN.PKL/PL.450/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 oleh PPN Pekalongan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23. RINCIAN TANAH PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	Tanah Mess Operator 2.800 m2	Pekalongan	5.152.458.000
2	Tanah Rumah Dinas 250 m2	Pekalongan	550.113.000
3	Tanah Pelabuhan Baru 47.400 m2	Pekalongan	10.317.212.000
4	Tanah Belakang Kantor 2.452 m2	Pekalongan	4.512.081.000
5	Tanah Hasil reklamasi 3.772 m2	Pekalongan	49.867.729
Jumlah			35.882.691.729

Tidak ada bidang tanah yang dikuasai/digunakan oleh Pihak Ketiga.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp16,333,577,844*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp16,333,577,844 dan Rp14.659.736.091. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin tersebut berasal dari 24 NUP dari Dit Kapi (1 NUP) berupa Printer, Dit KP (22 NUP terlampir) dan Sek DJPT (1 NUP) berupa sepeda motor dimana transaksi tersebut terjadi pada Semester I tahun 2025, sedangkan pada Semester II Tahun 2025 hanya terdapat penambahan senilai Rp195.452.501 diperoleh dari pengadaan barang/ Pembelian sehingga nilainya pada tahun 2025 menjadi Rp 1.673.841.753 Adapun dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24. RINCIAN MUTASI PERALATAN DAN MESIN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 2025

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2025	14.659.736.091
Mutasi tambah:	
Pembelian	195.452.501
Hibah	0
Transfer Masuk	1.478.389.252
Koreksi Tambah	0
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	16.333.577.844
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	- 12.930.801.266
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	3,402,776,578

A. Transaksi mutasi tambah peralatan dan mesin berupa:

1. Transfer masuk pada Tahun 2025 peralatan dan mesin dengan rincian:

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Nilai
1	Epson PLQ35 Passbook	Unit	1	11.330.000
2	Honda Fit S-NF-100-SLD Warna Silver	Unit	1	14.700.000
3	Kardex Besi	Unit	1	2.553.000
4	Kardex Besi	Unit	1	2.553.000
5	Meja Kerja Kayu	Unit	1	1.776.000
6	Meja Kerja Kayu	Unit	1	1.776.000
7	Sofa	Unit	1	4.384.500
8	A.C. Split	Unit	1	5.994.000

9	A.C. Split	Unit	1	5.994.000
10	CCTV - Camera Control	Unit	1	49.806.810
11	A.C. Split	Unit	1	5.930.000
12	Televisi	Unit	1	6.000.000
13	Loudspeake	Unit	1	1.000.000
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2.500.000
15	Timbangan Jembatan Kapasitas 10 Ton	Unit	1	638.425.000
16	Timbangan Jembatan Kapasitas 10 Ton	Unit	1	638.425.000
17	A.C. Split	Unit	1	9.435.000
18	A.C. Split	Unit	1	9.435.000
19	A.C. Split	Unit	1	5.125.000
20	A.C. Split	Unit	1	5.125.000
21	Loudspeaker	Unit	1	2.700.000
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2.587.500
23	A.C. Split	Unit	1	4.700.000
24	Closed Circuit Television	Unit	1	46.134.442
	Jumlah		24	Rp1,478,389,252

2. Pembelian Peralatan dan mesin dengan rincian sbb :

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Nilai
1	AC Unit	Unit	1	4.550.000
2	Televisi	Unit	1	6.900.000
3	PC Unit	Unit	1	13.319.999
4	Laptop	Unit	3	56.610.000
5	Laptop	Unit	5	29.970.000
6	Printer	Unit	2	11.400.000
7	Laptop	Unit	4	60.000.002
8	Tablet	Unit	1	1.880.000
9	Proyektor	Unit	1	7.215.000
10	Sound Wirelles	Unit	1	3.607.500
Total			20	195.452.501

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp 19.224.784.084

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.224.784.084 dan Rp17.739.711.884. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25. RINCIAN MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER TA 2025

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2025	17.739.711.884
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	1.485.072.200
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2025	19.224.784.084
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	- 4.022.839.508
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	15.201.944.576

Transfer Masuk dari Direktorat Kepelabuhan Perikanan berupa 8 unit Gedung dan bangunan sesuai dengan BAST Nomor : KPB.969/DJPT.1/PL-450/IV/2025 ini pada semester I tahun 2025, sedangkan untuk Semester II tahun 2025 tidak terdapat perubahan nilai pada Gedung dan Bangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Kode Barang	Type/Spesifikasi	Qty	Nilai	Keterangan
1	4010130999	Kantor Jembatan Timbang PP Tegalsari	1	101.116.000	Kantor Jembatan Timbang PP Tegalsari
2	4010130999	Kantor Syahbandar PP Tegalsari	1	215.765.800	Kantor Syahbandar PP Tegalsari
3	4010101001	Kantor Syahbandar	1	243.827.000	Kantor Syahbandar di PP Bajomulyo
4	4010101003	Tempat Kerja Kontainer PP Tegalsari	1	189.187.000	Tempat Kerja Kontainer PP Tegalsari
5	4010130999	Kantor Jembatan Timbang PP Bajomulyo	1	86.510.000	Kantor Jembatan Timbang PP Bajomulyo
6	4010130999	Kantor Syahbandar	1	215.392.800	Kantor Syahbandar PP Bajomulyo
7	4010130999	Kantor Syahbandar	1	216.520.800	Kantor Syahbandar PP Kluwut

8	4010130999	Kantor Syahbandar	1	216.752.800	Kantor Syahbandar PP Klidang Lor
Jumlah			8	1.485.072.200	

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp32.474.762.395*

RpJalan, Irigasi dan Jaringan RpSaldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.32.474.762.395 dan Rp.32.474.762.395. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 26. RINCIAN MUTASI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2025	32.474.762.395
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kualitas	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	32.474.762.395
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	- 14.523.096.048
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	17.951.666.347

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode ini.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp29.810.000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.29.810.000 dan Rp.29.810.000. Aset tetap tersebut berupa Maket/Miniatur/Replika dan tidak ada mutasi tambah aset tetap lainnya selama periode Semester II tahun 2025 ini. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 27. RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 1 Januari 2025	29.810.000
Mutasi tambah:	
~	~
Mutasi Kurang:	
~	~
Saldo Per 31 Desember 2024	29.810.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	~
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	29.810.000

Tidak ada mutasi tambah aset tetap lainnya selama periode pelaporan ini.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada KDP sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	~
Mutasi tambah:	
Pengembangan KDP	~
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar BMN Hilang Yang Sudah Diusulkan ke Pengelola	~
	~
Saldo per 31 Desember 2025	~

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp32,131,761,398

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp32.131.761.398 dan Rp29.046.162.675. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 28. RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	35.882.691.279	0	35.882.691.279
2.	Peralatan dan Mesin	16.333.577.844	(12.930.801.266)	3.402.776.578
3.	Gedung dan Bangunan	19.224.784.084	(4.298.116.300)	14.926.667.784
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.474.762.395	(14.902.843.832)	17.571.918.563
5.	Aset Tetap Lainnya	29.810.000	-	29.810.000
	Jumlah	103.945.625.602	(32.131.761.398)	71.813.864.204

C.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0

Saldo Aset Lainnya per per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.3.1 Dana Yang dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp887.997.806

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp887,997,806 dan Rp150.064.000. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 29. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Uraian	TA 2025	TA 2024
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Rp887,997,806	150.064.000
~	~	~
Total	Rp887,997,806	150.064.000

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) atas Adanya pengakuan atas progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum dibayarkan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Atas transaksi tersebut perlu dilakukan jurnal sebagai berikut :

- 392.815.000 pemeliharaan wisata bahari
- 322.346.000 Pemeliharaan gedung kantor
- 74.429.737 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan TA 2025
- 98.407.069 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan

Total Rp. 887.997.806

C.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp159.500.000

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp159.500.000 dan Rp3.547.325.500.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 30. RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	159.500.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	~
Penghapusan BMN	~
Saldo Per 31 Desember 2025	159.500.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(159.500.000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	0

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp159.500.000

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp159.500.000 dan Rp3.547.325.500. Berasal dari progres penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, untuk saat ini masih dalam tahap usulan penghapusan.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 31. RINCIAN AKUMULASI AMORTISASI DAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER TA 2025

<i>(dalam Rupiah)</i>				
No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
B.	Aset Lain-lain	159,500,000	(159,500,000)	0
	Jumlah	159,500,000	(159,500,000)	0

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp907.109.594 dan Rp167.956.445

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp907.109.594

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp907.109.594 dan Rp167.956.445.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut ::

Tabel 32. RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PER 31 DESEMBER TA 2025

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	19.111.788
2.	Utang kepada pihak ketiga lainnya	887.997.806
3.	Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-
Total		907.109.594

Terdapat utang pada pihak ketiga yang terdiri dari:

1. Beban Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp.19.111.788 berasal dari SPM terdiri dari SPM No 00009T tanggal 8 Januari 2025 senilai Rp16.953.615 merupakan Listrik bulan Desember 2025, dan SPM No 0010T tanggal 8 Januari 2026 merupakan Tagihan Listrik bulan Desember 2025 kantor Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Jadi total kedua SPM ini adalah Rp. 19.111.788,-
2. Utang kepada pihak ketiga lainnya Rp887.997.806 merupakan RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) atas Adanya pengakuan atas progres pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum dibayarkan menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Atas transaksi tersebut perlu dilakukan jurnal sebagai berikut :

- 392.815.000 pemeliharaan wisata bahari
 - 322.346.000 Pemeliharaan gedung kantor
 - 74.429.737 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Keamanan TA 2025
 - 98.407.069 Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan
- Total Rp. 887.997.806

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan..

Dengan rician sebagai berikut :

Tabel 33. RINCIAN UANG MUKA DARI KPPN PER 31 DESEMBER 2025 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Nomor	Sumber Dana	Tanggal Setor
Uang Persediaan	RM	0
Uang Persediaan	PNBP	0

C.4.3 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.4.4 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. RINCIAN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR TA 2025

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0
2.	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
3.	Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	0
Total		0

C.5 Ekuitas

Ekuitas

Rp72.307.748.219

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72.307.748.219, dan Rp72.021.998.989. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.450.499.230*

Pendapatan Negara Bukan Pajak RpJumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.450.499.230 dan Rp1.481.758.791. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,11%. Realisasi pendapatan pada akun 425122 bersumber dari Penghapusan barang milik negara melalui lelang barang Suction Dregder dan 4 alat berat, Realisasi pendapatan pada akun 425151 berasal dari kendaraan pengangkutan (forklift) dan sewa gedung dan bangunan (aula) dan realisasi pendapatan dan sewa rumah dinas, dan akun 425621 berasal dari pas masuk kendaraan TPI (roda 2/3,4,6) pas masuk aquarium dan wahana edukasi air, pas masuk orang wisata bahari, pas masuk kendaraan wisata bahari (2,4,6,8), pas masuk bus wisata bahari, tambat labuh, kebersihan kolam kapal perikanan, penggunaan kios wisata bahari, kebersihan kios/warung, pemakaian listrik dan air. 425912 berasal dari pengembalian pembayaran telepon dari telkom pada bulan Oktober 2025. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 35. RINCIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 31 DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/ Turun	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	385.528.914	343.306.990	42.221.924	12.30
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	5.894.098	5.894.098	(100)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	29.423.968	4.875.000	24.548.968	503,57
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	1.035.465.207	1.127.306.012	(91.840.805)	(8,15)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	81.141	0	81.141	100
Jumlah	1.450.499.230	1.481.758.791	(31.259.561)	(2,11)

Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,11%. Hal tersebut disebabkan diantaranya oleh:

1. Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan bersumber dari sewa rumah dinas dinas sebanyak 2 unit;
2. Realisasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana naik 503.57%
3. Realisasi Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan berasal dari pas masuk kendaraan TPI (roda 2/3,4,6) pas masuk aquarium dan wahana edukasi

air, pas masuk orang wisata bahari, pas masuk kendaraan wisata bahari (2,4,6,8), pas masuk bus wisata bahari, tambat labuh, kebersihan kolam kapal perikanan, penggunaan kios wisata bahari, kebersihan kios/warung, pemakaian listrik dan air.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp9.291.467.394

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.291.467.394 dan Rp8.023.536.454

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 15,80 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya kenaikan signifikan pada belanja pegawai PPPK. Adanya kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.267.930.940 (15,80%) diakarenakan adanya penambahan CPNS sebanyak 7 orang dan PPPK sebanyak 5 Orang, Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Penyebab kenaikan beban pegawai tersebut diantaranya karena:

- kenaikan signifikan pada belanja pegawai PNS. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan 7 orang CPNS yang naik jadi PNS dan sebanyak 5 orang PPPK.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. RINCIAN BEBAN PEGAWAI PER DESEMBER TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/ Turun	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.552.088.540	2.157.885.400	394.203.140	18,27
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.121	28.824	11.297	39,19
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	212.433.500	175.189.810	37.243.690	21,26
Beban Tunj. Anak PNS	59.040.042	47.949.228	11.090.814	23,13
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	196.874.000	174.044.000	22.830.000	13,12

Beban Tunj. PPh PNS	19.574.599	15.052.146	4.522.453	30,05
Beban Tunj. Beras PNS	150.199.080	123.331.260	26.867.820	21,79
Beban Uang Makan PNS	414.775.000	263.175.000	151.600.000	57,60
Beban Tunjangan Umum PNS	68.530.000	52.705.000	15.825.000	30,03
Belanja Gaji Pokok PPPK	786.055.500	760.447.900	25.607.600	3,37
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15.319	17.871	(2.552)	(14,28)
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	74.280.560	61.069.330	13.211.230	21,63
Belanja Tunjangan Anak PPPK	23.435.246	21.677.774	1.757.472	8,11
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	108.980.000	110.480.000	(1.500.000)	(1,36)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	67.205.760	61.629.420	5.576.340	9,05
Belanja Uang Makan PPPK	161.583.000	109.941.000	51.642.000	46,97
Beban Tunjangan Umum PPPK	2.685.000	-	2.685.000	-
Beban Uang Lembur	88.407.000	75.302.000	13.105.000	17,40
Belanja Uang Lembur PPPK	31.182.000	22.237.000	8.945.000	40,23
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.192.619.188	2.746.188.524	446.430.664	16,26
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.056.263.939	1.019.984.967	36.278.972	3,56
Jumlah Beban	9.291.467.394	8.023.536.454	1.267.930.940	15,80

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp110.229.600*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp110,229,600 dan Rp 121,757,250

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -9,47 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan alat tulis kantor akibat adanya tambahan pegawai baik PNS maupun P3K serta petugas pendataan yang walaupun pengelolaan honorariumnya ditarik ke pusat, namun operasional kegiatannya dibebankan ke PPN Pekalongan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 37. RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/ Turun	%
Beban Persediaan Konsumsi	110.229.600	121.757.250	(11.527.650)	(9,47)
Jumlah Beban	110.229.600	121.757.250	(11.527.650)	(9,47)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp2.423.780.383*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.423.780.383 dan Rp3.016.603.583..

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 19,65% dibandingkan dengan Tahun 2024 diantaranya disebabkan oleh:

1. Adanya perubahan kebijakan pembayaran honor kontrak perorangan petugas pendataan sebanyak 48 orang (penempatan di Pekalongan, Tegalsari, Bajomulyo, Klidang Lor dan Tasik Agung) yang awalnya dikelola anggarannya oleh satker, mulai tahun 2025 dilaksanakan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/ Turun	%
Beban Keperluan Perkantoran	435.420.168	431.970.863	3.449.305	0,80
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	445.690	(445.690)	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	103.824.000	108.168.000	(4.344.000)	(4,02)
Beban Barang Operasional Lainnya	77.321.300	173.899.200	(96.577.900)	(55,54)
Beban Bahan	112.175.137	467.149.574	(354.974.437)	(75,99)
Beban Honor Output Kegiatan	-	40.000.000	(40.000.000)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	1.975.214	(1.975.214)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	195.782.908	204.858.203	(9.075.295)	(4,43)
Beban Langganan Telepon	1.943.165	122.188.267	(120.245.102)	(98,41)
Beban Langganan Air	8.944.460	4.268.760	4.675.700	109,53
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	138.987.721	9.400.164	129.587.557	1.378,57
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-	-
Beban Sewa	2.760.000	16.150.000	(13.390.000)	(82,91)
Beban Jasa Profesi	-	5.700.000	(5.700.000)	(100,00)
Jumlah Beban	2.423.780.383	3.016.603.583	(592.823.200)	(19,65)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp1.658.075.771*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.658.075.771 dan Rp1.925.917.184.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (19,91%) dibandingkan dengan Tahun 2024, diantaranya disebabkan oleh:

1. Adanya penghentian penggunaan BMN atas Peralatan dan mesin (Suction Dredger 1 Unit , 4 alat berat yang dihapuskan pada semester II tahun 2025.
2. Adanya 1 unit kendaraan dinas yang dihentikan penggunaanya.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/ Turun	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	366.044.724	158.107.000	207.937.724	131,52
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	536.123.000	602.117.100	(65.994.100)	(10,96)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	686.305.094	907.053.434	(220.748.340)	(24,34)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	64.810.000	(64.810.000)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Irigasi	41.150.000	83.990.000	(42.840.000)	(51,01)
Beban Pemeliharaan Jaringan	28.452.953	109.839.650	(81.386.697)	(74,10)
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-	-
Jumlah Beban	1.658.075.771	1.925.917.184	(267.841.413)	(13,91)

Rincian barang yang dipelihara adalah sebagai berikut:

Tabel 40. RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Gedung kantor/bangunan gedung permanen
2	Balai Pertemuan Nelayan/Bangunan Gedung Pertemuan Permanen

Tabel 41. RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Gedung Laboratorium Mini (Gedung Laboratorium Permanen)
2	Gedung Pertemuan Wisata Bahari (Gedung Pertemuan Permanen)
3	Ruang Genset (Gudang Tertutup Permanen)
4	Gedung Kantor (Gudang Tertutup Permanen)
5	Pos Terpadu (Gedung Pos Jaga Permanen)
6	Taman Wisata Bahari (Taman Permanen)
7	Depo Logistik (Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen)
8	Wahana Edukasi Air (Gedung Olahraga Kolam Renang)
9	Bangunan Navigasi Mercusuar (Menara Suar Listrik Non Diesel)
10	Pagar Batas Wisata Bahari (Tanda Batas Administrasi Kepemilikan) (Pagar Barat)
11	Pos Satpam II (Timur Sungai/Pos Jaga Permanen)
12	Tempat Parkir Kantor PPNP (Gedung Garasi/Pool Permanen)
13	Ikon Wisata Bahari (Bangunan Terbuka Lainnya)
14	Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan/Rumah Negara Gol.I Tipe C Permanen
15	Papan Nama (Tugu Tanda Batas Administrasi Kepemilikan)
16	Kantin Wisata Bahari/Kios Waserda (Gedung Pertokoan)
17	Pemeliharaan Gedung SWRO
18	Plengsengan Belakang Kantor/Timur (Bangunan Pembawa Pengaman Sungai)
19	Bangunan Gedung Instalansi Lainnya (Tempat Penampungan Sampah)
20	Pagar Permanen (Pagar BRC)
21	Gedung Akuarium
22	Gazebo (Bangunan Gedung Terbuka) 8 Unit x 4 m2
23	Pos Jaga Wisata Bahari (Gedung Pos Jaga Permanen)
24	Pos Jaga Wisata Bahari (Gedung Pos Jaga Permanen Rumah Dinas WR. Supratman (Rumah Nagara Gol. I Tipe D Permanen)
25	Pos Satpam TPI (Gedung Pos Jaga Permanen)

Tabel 42. RINCIAN PERALATAN DAN MESIN YANG DIPELIHARA

No.	Peralatan dan Mesin yang dipelihara
1	Jaringan LAN
2	Pompa Air
3	Genset
4	Mesin Potong Rumput
5	Pesawat TV
6	Gerobak Sampah
7	Sound System
8	(Service dan Pengisian) Tabung Pemadam Kebakaran
9	LCD Proyektor
10	CCTV
11	AC Split
12	Running Text
13	Penyemprot Air Bertekanan Tinggi
14	Solar Cell
15	Neon Box/Papan Nama/Papan Visual
16	Peralatan Mainan (Peralatan Permainan Lainnya)
17	Chainsaw
18	Alat Komunikasi
19	Scanner
20	Walkthrough/Portal Metal Detector (Portal Gate Wisata Bahari)
21	Pemeliharaan Video Conference
22	Kendaraan Roda 4
23	Kendaraan Roda 4 Double Gardan (Hilux/G-9584-BA)
24	Kendaraan Roda 3
25	Kendaraan Roda 2
26	Dump Truck Sampah
27	Air Conditioning/AC Central

28	Forklift
29	Truck Crane
30	Komputer/Notebook
31	Printer
32	PABX
33	Meubelair

Tabel 43. RINCIAN JALAN DAN JEMBATAN YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Dermaga Jetty (Gardu Pandang)
2	Dermaga Timur

Tabel 44. RINCIAN IRIGASI YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	MCK Wisata Bahari
2	MCK TPI
3	Drainase Kawasan

Tabel 45. RINCIAN JARINGAN YANG DIPELIHARA

No.	Gedung yang dipelihara
1	Jaringan Listrik
2	Instalasi Air Bersih
3	Jaringan SWRO

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas Rp94.276.010*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp94.276.010 dan Rp808.643.370.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 88,34 persen disebabkan surat edaran dari menteri keuangan tentang penghematan anggaran sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online (zoom) maupun hibrid sehingga peserta kegiatan tidak harus menghadiri secara langsung (offline), serta adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 46. RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
Beban Perjalanan Biasa	86.331.010	642.440.717	(556.109.707)	(86,56)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	4.000.000	(4.000.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	35.800.000	(35.800.000)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.945.000	126.402.653	(118.457.653)	(93,71)
Jumlah Beban	94.276.010	808.643.370	(714.367.360)	(88,34)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortasi
Rp2.614.141.515*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.614.141.515 dan Rp 3.211.607.316

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 47. RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TA 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik/Turun	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.015.147.371	712.630.511	712.630.511	100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	550.553.580	520.852.136	520.852.136	100
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	275.665.543	667.682.471	667.682.471	100
Beban Penyusutan Irigasi	386.532.279	924.199.456	924.199.456	100
Beban Penyusutan Jaringan	386.242.742	386.242.742	386.242.742	100
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	100
Jumlah Penyusutan	2.614.141.515	3.211.607.316	(597,465,801)	(18.603)
Jumlah Amortisasi	0	0	0	100
Jumlah Beban	2.614.141.515	3.211.607.316	(597,465,801)	(18.603)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp822

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp822 dan Rp3.303

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 48. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBFP	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	822	3.303	75.11
Jumlah	822	3.303	75.11

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

*Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar
Rp385.528.914*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp385.528.914 dan Rp360.025.990

Tabel 49. SURPLUS (DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Pendapatan Pelepasan Aset	~	16.719.000	(100)
Beban Pelepasan Aset	385.528.914	343.306.990	~
Jumlah	385.528.914	360.025.990	(7.08)

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp81.141*

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp81.141 dan Rp2.354.711.

Tabel 50. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	81,141	2,354,711	(96.95)
Jumlah	81,141	2,354,711	(96.95)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp72,021,998,989

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.72.021.998.989 dan Rp.71.854.839.811.

E.2 Surplus/Defisit-LO

Defisit LO -
Rp14,741,472,265

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp14,741,472,265 dan Rp.16.192.265.860. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 51. RINCIAN KOREKSI ASET NON REVALUASI TA 2025

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah	0

E.4.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.1.883

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi ini adalah merupakan koreksi atas penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp.1.883,- atas pencatatan piutang lainnya tahun 2023 (pengembalian tukin dan uang makan Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024). Koreksi Lain-Lain terdiri dari:

Tabel 52. RINCIAN KOREKSI LAIN-LAIN TA 2025

(dalam Rupiah)

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Lainnya	0
Jumlah	0

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Rp15.027.221.495

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.027.221.495 dan Rp16.226.305.155.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Tabel 53. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TA 2025

(dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	13.784.309.334
Ditagihkan ke Entitas Lain	(1.249.092.083)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	2.492.004.244
Jumlah	15.027.221.495

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL Rp0

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp 6.097.634.430, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 725.971.544.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer Masuk
Rp2.492.004.244*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.492.004.244 yang terdiri dari :

Tabel 54. TRANSFER MASUK TA 2025

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Nilai	UPT Asal
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)		1	11.330.000	
	Epson PLQ35 Passbook	Unit	1	11.330.000	Ditkapi, Direktorat Kapal dan Alat Tangkap Perikan
2	Sepeda Motor		1	14.700.000	
	Honda Fit S-NF-100-SLD Warna Silver	Unit	1	14.700.000	Sekretariat Direktorat Jenderal Tangkap
3	Peralatan Mesin		22	1.452.359.252	Ditkepelabuhanan perikanan
	Kardex Besi	Unit	1	2.553.000	
	Kardex Besi	Unit	1	2.553.000	
	Meja Kerja Kayu	Unit	1	1.776.000	
	Meja Kerja Kayu	Unit	1	1.776.000	
	Sofa	Unit	1	4.384.500	
	A.C. Split	Unit	1	5.994.000	
	A.C. Split	Unit	1	5.994.000	
	CCTV - Camera Control	Unit	1	49.806.810	
	A.C. Split	Unit	1	5.930.000	
	Televisi	Unit	1	6.000.000	
	Loudspeake	Unit	1	1.000.000	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2.500.000	
	Timbangan Jembatan Kapasitas 10 Ton	Unit	1	638.425.000	
	Timbangan Jembatan Kapasitas 10 Ton	Unit	1	638.425.000	
	A.C. Split	Unit	1	9.435.000	
	A.C. Split	Unit	1	9.435.000	
	A.C. Split	Unit	1	5.125.000	
	A.C. Split	Unit	1	5.125.000	
	Loudspeaker	Unit	1	2.700.000	

	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2.587.500	
	A.C. Split	Unit	1	4.700.000	
	Closed Circuit Television	Unit	1	46.134.442	
4	Gedung Bangunan	Unit	8	1.485.072.200	Ditkepelabuhana perikanan
	Kantor Jembatan Timbang PP Tegalsari	Unit	1	101.116.000	
	Kantor Syahbandar PP Tegalsari	Unit	1	215.765.800	
	Kantor Syahbandar	Unit	1	243.827.000	
	Tempat Kerja Kontainer PP Tegalsari	Unit	1	189.187.000	
	Kantor Jembatan Timbang PP Bajomulyo	Unit	1	86.510.000	
	Kantor Syahbandar	Unit	1	215.392.800	
	Kantor Syahbandar	Unit	1	216.520.800	
	Kantor Syahbandar	Unit	1	216.752.800	
	Jumlah Total		32	2.963.461.452	
	Akumulasi Penyusutan			471.457.208	
	Jumlah Transfer Masuk Akrua			2.492.004.244	

E.5.3 Pengesahan Hibah dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp72.307.748.219

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp72.307.748.219 dan Rp72.021.998.989

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Telah diterbitkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor B.1531/PPN.PKL/PL.450/VIII/2025 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sesuai dengan Sesuai dengan Peta Bidang Tahan No. 276/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan menerangkan bahwa Tanah Hasil Reklamasi/Tanah Pengembangan Pelabuhan Onshore dengan kode Barang 2010202003 yang semula Luas 8.284 m² menjadi 3.772 m², Luas tanah lebih kecil dari ukuran awal dikarenakan adanya pengurangan batas Sempadan Pantai (dokumen terlampir).
2. Telat diterbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan nomor : JL.-161/1/KNL.0903/2026 untuk kendaraan dinas Roda 4 berupa 1 unit Mobil Innova.
3. Telat terbit Nota Dinas dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Nomor NOMOR 196/PPN.PKL/KU.520/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 tentang Instruksi Pencatatan Pembelian Kursi sebagai BMN Ekstrakomptabel dan Koreksi Nilai PYMHD dimana diinstruksikan sebagai berikut :
 - Menginstruksikan kepada Petugas/Operator BMN agar melakukan pencatatan pembelian 8 (delapan) unit kursi senilai Rp5.166.560,- sebagai BMN Ekstrakomptabel pada Laporan Keuangan periode 13
 - Menginstruksikan kepada Operator General Ledger dan Pelaporan (GLP) agar melakukan koreksi nilai PYMHD menjadi sebesar Rp473.860.560 pada Laporan Keuangan periode 13.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Semua tindak lanjut atas temuan BPK RI Nomor 38/LHP/XVII/02/2009 tanggal 24 Februari 2009 atas Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, TPI Higienis dan jaringan listrik TPI Higienis, telah disampaikan dan dinyatakan tuntas oleh Tim BPK (*screenshot* aplikasi auditee terlampir).
2. Dalam rangka pengimplementasian Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK No.17/PMK.09/2019 telah ditetapkan 5 (lima) akun signifikan di PPN Pekalongan yakni 425621 (Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan - Tambat Labuh), 132111 (Peralatan dan Mesin), 114311 (Pendapatan Yang Masih Harus Diterima), 111711 (Kas di Bendahara Penerimaan) dan 111611 (Kas di Bendahara Pengeluaran).

Dari kelima akun signifikan tersebut, pada bulan agustus PPN Pekalongan telah menyampaikan hasil pengujian pengendalian tingkat entitas (Tabel B.1) dan Pengendalian Umum Teknologi dan Informasi (Tabel B.2) beserta dokumen pendukungnya. Pengujian PITE pada Tabel B.1 dilakukan menggunakan 2 teknik yaitu teknik survei dan teknik reviu dokumen. PPN pekalongan telah melaksanakan teknik survei dengan jumlah responden 30 pegawai yang terdiri dari Kepala Unit Kerja, PPK, PPSPM, Bendahara, Penyusun Laporan Keuangan dan BMN, Tim SPIP PPN Pekalongan dan Perwakilan Pegawai dengan hasil rata-rata 30,83. Sedangkan untuk teknik reviu dokumen juga telah dipenuhi oleh PPN Pekalongan. Berdasarkan teknik survei dan teknik dokumen yang telah dilaksanakan perolehan nilai entitas PPN Pekalongan sebesar 90 % dengan kategori tinggi. Pengujian PUTIK pada tabel B.2 dilaksanakan dengan reviu dokumen pada pengendalian utama area akses logical dan area operasional teknologi dan informasi dan komunikasi dengan hasil efektif. Pada bulan oktober PPN Pekalongan masih melakukan pemenuhan dokumen pendukung pengendalian utama dari tabel A yang merupakan proses pengujian tingkat entitas (Tabel C.1) dan Pengendalian Umum TIK (tabel C.2). Berdasarkan hasil review dari Inspektorat Jenderal terkait dokumen pendukung PIPK Tahun 2024, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh PPN Pekalongan yaitu 1) kekurangan bukti dukung pada tabel B1; 2) melengkapi daftar responden dengan nama responden; 3) melengkapi kolom hasil penelitian lanjutan yang mendapat nilai 0 sesuai catatan hasil reviu; 4) menginput nomor dokumen pada tabel C1; 5) menambahkan skor 0 yang berasal dari Tabel B.1 ke dalam Tabel D dan selanjutnya melakukan penelitian. Kelima hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPN Pekalongan sehingga pengendalian intern atas pelaporan keuangan mendapatkan penilaian efektif dengan kesimpulan memadai dalam arti tidak terdapat kelemahan material atau kelemahan signifikan.